BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro

a. Data Geografi

Secara umum kondisi geografis Kecamatan Ngoro tergolong dataran rendah dengan ketinggian 88 meter dari permukaan air laut dengan curah hujan tercatat 1900 mm/th dengan suhu udara rata-rata 29^0 C.

Jarak Kantor Kecamatan dengan

a. Desa/kelurahan yang terjauh : 7 km 1 jam

b. Ibukota Kabupaten/Kota : 25 km 1 jam

c. Ibukota Provinsi : 80 km 2 jam

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Mojowarno

Sebelah Timur : Kecamatan Bareng

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Sebelah Barat : Kecamatan Gudo

Kecamatan Ngoro memiliki Luas Wilayah 49,87 hektar dengan jenis peruntukan tanahnya secara umum antara lain:

Tabel 1
Jenis Peruntukan Tanah

Tanah sawah dan tegal / ladang	3.030 Ha
Tanah pekarangan / pemukiman	1.747 Ha
Tanah-tanah lainnya	124 Ha

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ngoro, 2010

Jumlah penduduk Ngoro adalah 68.445 jiwa, dimana mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Potensi sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan dan diberdayakan agar mampu mengangkat Kecamatan Ngoro sebagai produsen pertanian yang besar (lumbung pangan), serta dapat meningkatkan sub pertaniannya seperti perikanan dan peternakan.

Sektor pertanian merupakan potensi wilayah Kecamatan Ngoro yang perlu diprioritaskan secara berkelanjutan dan mengarah pada Pertanian Ramah Lingkungan dengan memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan.

Tabel 2
Luas Daerah Menurut Desa

Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (Km2)
Jombok	4,23
Genuk Watu	5,01
Rejoagung	5,31
Kauman	2,58

Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (Km2)
Ngoro	2,56
Badang	4,86
Pulorejo	5,11
Banyuarang	3,80
Sidowarek	3,24
Kesamben	3,24
Kertorejo	3,50
Gajah	3,28
Sugih Waras	3,15

Sumber : Data Monografi Kecamatan Ngoro, 2010

b. Data Demografi

1) Jumlah Penduduk

   a) Laki-laki : 28.098 orang

   b) Perempuan : 35.155 orang

   c) Anak L/P di atas usia sekolah (7 th) : 5.192 orang

2) Jumlah Penduduk Dewasa : 8.322 orang

3) Jumlah Kepala Keluarga : 19.342 KK (Kepala Keluarga)

4) Jumlah Rumah Tangga

   a) Sangat Miskin : 804

   b) Miskin : 1.877

c) Hampir Miskin : 2.663

5) Mata Pencaharian atau Pekerjaan

Tabel 3
Mata Pencaharian atau Pekerjaan (Jiwa)

Mata Pencaharian	Jumlah	%
Petani	12.381	36%
Buruh Tani	12.042	35%
Pegawai Negeri	1.395	4%
Tukang Batu/Kayu	1.469	4,2%
Angkutan	736	2,1%
ABRI	234	0,6%
Pensiunan	639	1,8%
Pedagang	2.955	8,5%
Lainnya	2.514	7,3%

Sumber : Data monografi Kecamatan Ngoro, 2010

Dari data tabel di atas dapat dilihat sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Ngoro adalah petani. Menurut data dilapangan kecenderungan masyarakat Kecamatan Ngoro memilih sektor pertanian karena masih tersedianya lahan pertanian yang luas selain itu pengetahuan tentang pertanian secara turun temurun. Mata pencaharian warga Kecamatan Ngoro yang bekerja sebagai petani sebanyak 12.381 jiwa atau 36%. Sedangkan pada sektor pegawai negeri sipil didominasi oleh profesi guru.sebanyak 1.395 jiwa atau 4%. Walaupun demikian, di

sisi lain banyak juga yang masih berstatus sebagai buruh tani. Biasanya warga yang berprofesi sebagai buruh tani adalah warga yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki tanah sendiri untuk di olah sebanyak 1.242 jiwa atau 35%**.** Pada kondisi terakhir sektor ekonomi bagi keluarga miskin sangat memperihatinkan, hal ini disebabkan, antara lain:kurangnya modal, gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Selain itu, kurangnya keterampilan dalam bidang yang ditekuni, dan tidak adanya keterampilan pada ibu rumah tangga miskin yang digunakan untuk menambah penghasilan semakin menambah rumit masalah kemiskinan di Kecamatan Ngoro. Sedangkan warga Kecamatan Ngoro yang berprofesi sebagai Tukang Batu/Kayu sebanyak 1.469 jiwa atau 4,2%, selain itu yang berprofesi sebagai angkutan sebanyak 736 jiwa atau 2,1%, ABRI sebanyak 234 jiwa atau 0,6%, warga yang sudah pensiun sebanyak 639 jiwa atau 1,8%, sebagai pedangang sebanyak 2.955 jiwa atau 8,5%. Dan yang berprofesi selain itu sebanyak 2.514 jiwa atau 7,3%.

6) Tingkat Pendidikan

Tabel 4
Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
Belum sekolah	4321	8,7%
Tidak tamat Sekolah Dasar	0	0
Tamat SD/Sederajat	21247	43%
Tamat SLTP/Sederajat	13426	27,2%

Pendidikan	Jumlah	%
Tamat SLTA/Sederajat	8825	17,8%
Tamat Akademi/Sederajat	0	0
Tamat Perguruan Tinggi /Sederajat	1485	3%
Buta huruf	0	0

Sumber : Data Demografi Kecamatan Ngoro, 2010

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Ngoro jumlah paling besar adalah Tamatan SD yaitu sebanyak 21247 (43%) orang kemudian diikuti dengan Tamatan SLTP yaitu sebanyak 13426 (27,2%) orang. Tamatan SLTA sebanyak 8825 (17,8%) orang. Sedangkan Tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 1485 (3%) orang. Jadi dilihat dari tabel di atas bahwa kebanyakan tingat pendidikan di kecamatan Ngoro tergolong masih rendah, karena Tamatan SD merupakan tamatan yang paling banyak di kecamatan Ngoro.

2. Gambaran Umum Dinas PU Cipta Karya

a. Profil Dinas PU Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009, tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

a) Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum cipta karya, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

1) Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;

3) Perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan serta pengawasan peralatan dan perbekalan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
5) Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
6) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan;
7) Pengelolaan tugas kesekretariatan;
8) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah.

9) Struktur dan Susunan Organisasi

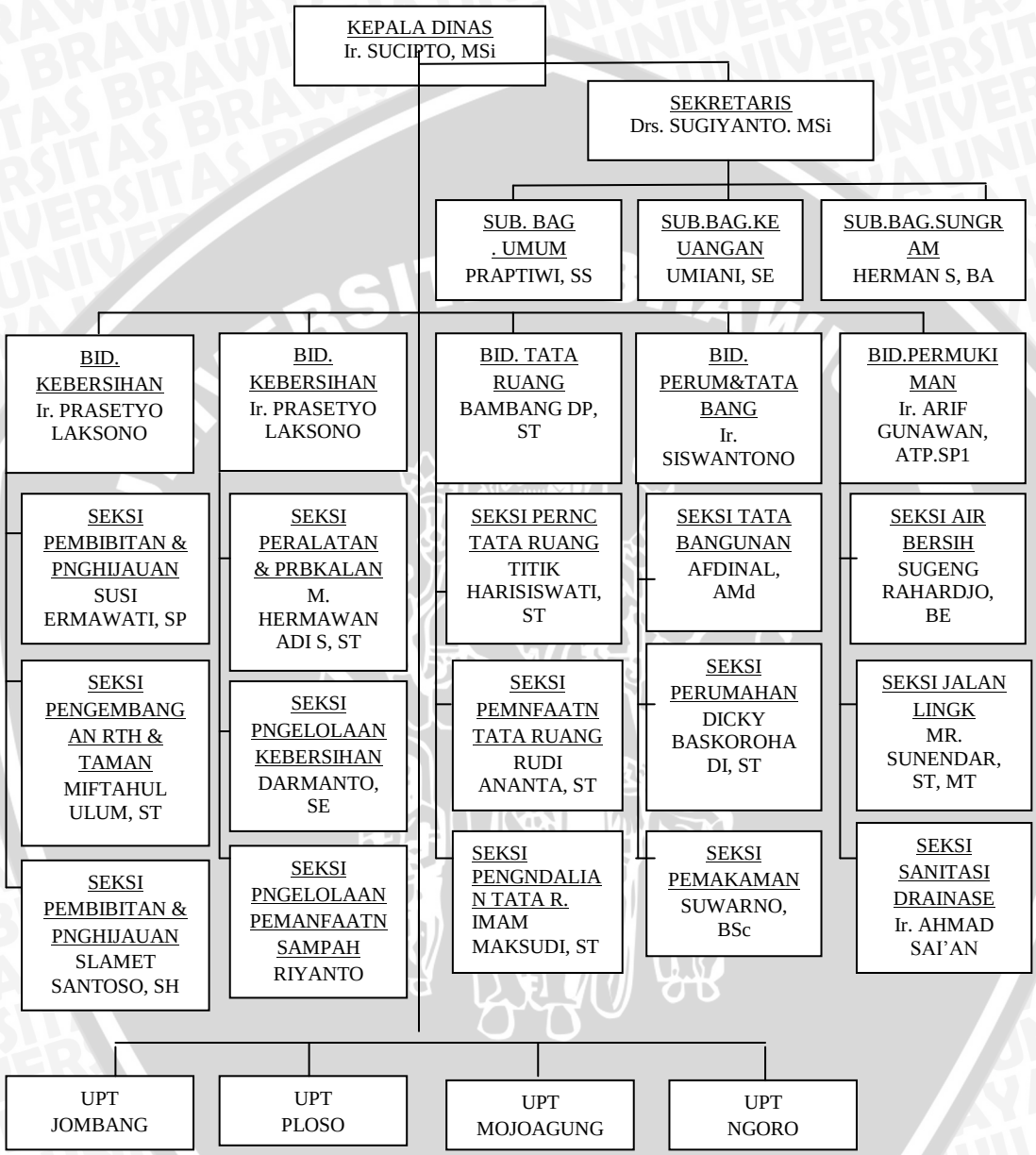

Gambar 1 Struktur dan Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang mempunyai struktur/perangkat organisasi yang terdiri atas 5 (lima) Bidang dan satu Sekretariat dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pertamanan, membawahi :
    a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
    b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
    c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.
4. Bidang Kebersihan, membawahi :
    a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
    b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
    c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.
5. Bidang Tata ruang, membawahi :
    a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
    c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

6. Bidang Peruahan dan Tata Bangunan, membawahi :
    a. Seksi Tata Bangunan;
    b. Seksi Perumahan;
    c. Seksi Pemakaman.
7. Bidang Permukiman, membawahi;
    a. Seksi Air Bersih;
    b. Seksi Jalan Lingkungan;
    c. Seksi Sanitasi dan Drainase.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai urusan pemerintahan yang melayani Tata Ruang, air bersih, jalan lingkungan, saluran drainase, air limbah, perumahan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan persampahan. Untuk melakukan perencanaan pembangunan maka sangat dibutuhkan sasaran dan tujuan renstra yang dilaksanakan. Dari kedelapan bidang pelayanan tersebut dapat dijabarkan bahwa Dinas mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat pada bidang permukiman.

Sebagai gambaran dalam melaksanakan tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan memiliki potensi pelayanan yang harus ditingkatkan sebagai berikut:

1) Pelayanan Bidang Tata Ruang pada penyusunan rencana rinci tata ruang dari 22 produk hukumnya yang memerlukan penyusunan ada 7 dokumen karena

telah berakhir masa perencanaannya sedangkan yang memerlukan revisi ada 15 dokumen , dan yang telah direvisi baru 2 dokumen.

2) Kabupaten Jombang memiliki potensi 41 desa rawan air bersih yang tersebar di sembilan kecamatan dengan acuan penduduk terlayani 55% baru mencapai tingkat pelayanan mencapai 20% atau di 14 desa;
3) Pelayanan terhadap jalan lingkungan dari 306 desa/Kelurahan yang harus dilayani baru 74 desa yang mencapai pelayanan diatas 80% (terutama daerah perkotaan), sisanya belum terlayani dengan baik, sehingga secara keseluruhan tingkat pelayanan baru mencapai 25%;
4) Pelayanan terhadap saluran drainase khusus untuk kota Jombang masih terdapat 9 lokasi daerah genangan yang belum tertangani, sedangkan untuk wilayah pedesaan masih diperlukan pendataan lebih lanjut terhadap lokasi daerah genangan yang memerlukan penanganan secara proritas;
5) Pelayanan terhadap air limbah/sanitasi dari 62 Desa yang membutuhkan MCK masih dapat dilaksanakan dengan tingkat pelayanan 10%;
6) Pada urusan perumahan sampai saat ini masih terdapat sekitar 66.376 rumah tidak layak huni perlu ditangani yang tersebar di Kabupaten Jombang;
7) Pelayanan terhadap Ruang Terbuka Hijau khusus untuk Taman Kota di wilayah perkotaan telah dapat ditangani dengan baik yaitu di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Mojoagung, sedangkan untuk 19 kecamatan lainnya masih belum tertangani secara keseluruhan;

8) Pelayanan bidang persampahan baru mampu melayani 5 kecamatan (wilayah kota Jombang dan IKK Ngoro, Mojoagung, Ploso, Peterongan) dari 21 kecamatan dengan tingkat pelayanan baru mencapai 12,28%, akan tetapi khusus pada wilayah kota Jombang tingkat pelayanan telah mampu mencapai 80%.

Sebagai acuan untuk melihat keberhasilan indikator kinerja dinas maka dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan memiliki salah satu pedoman yang diacu yaitu Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang pedoman standar pelayanan minimal pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum. Hal ini dikarenakan tingkat Kabupaten masih belum menetapkan standar pelayanan minimal untuk dijadikan pedoman pelayanan.

Dalam menunjang arah pembangunan daerah yang diharapkan dapat dilaksanakan secara integral dan komprehensif maka pemerintah telah menetapkan arahan pembangunan baik terhadap pogram dan kegiatan dengan mengeluarkan instrument pendukungnya.

Berdasarkan PP 38 dan PP 41 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri No.59 Tahun 2007 telah ditunjukkan arahan Program dan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan menunjukkan skala perioritas sebagai berikut :

1) Bidang PU Cipta Karya, dengan prioritas : Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan infrastruktur perdesaaan, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) serta penyehatan lingkungan permukiman. Penyehatan lingkungan permukiman terdiri atas tiga (3) sub bidang, yaitu : pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainase, masing masing mempunyai isu dan/atau permasalahan yang berbeda, dalam usulan program menyangkut ketiga sub bidang tersebut masih terbatas di kawasan perkotaan dan kawasan daerah aliran sungai (DAS) khususnya alur Sungai Brantas. Usulan sub bidang : pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainase disesuaikan dengan kondisi lapangan yang sangat prioritas segera ditangani dan berdasarkan kemampuan dana APBD untuk mendapinginya;
2) Bidang Penataan Ruang, dengan prioritas : Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
3) Bidang Perumahan, dengan prioritas : Pengembangan Perumahan dan pengelolaan areal pemakaman.

c. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tentu saja harus didukung dengan strategi dan kebijakan yang secara integral dan komprehensif mampu memberikan support serta sebagai langkah utama dalam melaksanakan beban

tanggung jawab tugas yang menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

Secara Umum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai 3 (tiga) Strategi dan kebijakan yang sangat mendasar untuk menentukan kebijakan dalam meletakkan arah pembangunan yaitu:

1) Peningkatan Kebutuhan dasar Prasarana dan Sarana Permukiman.
2) Penataan Ruang yang Integral dan komprehensif terhadap Kebutuhan Ruang daerah.
3) Peningkatan Kualitas Perumahan masyarakat yang sehat

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Yang merupakan suatu gambaran bersama mengenai keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten Jombang, Dinas Pekerjaan Umum mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang, Pernyataan Visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah :

"Terwujudnya permukiman yang berkembang dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera tahun 2013"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a) **" Permukiman "** adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

b) **"Berkembang"** adalah adanya upaya peningkatan pembangunan permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu pembangunan dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.

c) **"Berkelanjutan"** adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan (*environmental development*) sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

d) "**Masyarakat Sejahtera**" adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dengan mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

2. Misi

Untuk mewujudkan Vsi tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) Misi sebagai berikut :

a) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan;
b) Melaksanakan pengendalian pemanfataan ruang dengan dilandasi legalitas hukum.

3. Nilai

Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan

memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

4. Program

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tentu saja harus didukung dengan strategi dan kebijakan yang secara integral dan komprehensif mampu memberikan *support* serta sebagai langkah utama dalam melaksanakan beban tanggung jawab tugas yang menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

Adapun kebijakan yang digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang diwujudkan dengan peningkatan tertib pelaksanaan administrasi perkantoran;

   Dengan Program :

   a) Program pelayanan administrasi perkantoran;
   b) Program peningkatan disiplin aparatur.

2. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan resiko fiskal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;

   Dengan Program :

Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

3. Revitalisasi sarana dan prasarana pemerintahan daerah;

   Dengan Program :

   Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

4. Peningkatan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan daerah;

   Dengan Program :

   Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.

5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman;

   Dengan Program :

   a) Program pembangunan jalan dan jembatan;
   b) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
   c) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
   d) Program pembangunan turap/talud/bronjong;
   e) Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
   f) Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
   g) Program pengembangan perumahan;
   h) Program lingkungan sehat perumahan;
   i) Program pemberdayaan komunitas perumahan;
   j) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
   k) Program pengelolaan areal pemakaman.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau perkotaan, dan upaya konservasi sumberdaya alam;

   Dengan Program :

   a) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

   b) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

7. Peningkatan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan daerah.

   Dengan Program :

   a) Program perencanaan tata ruang;

   b) Program pemanfaatan ruang;

   c) Program pengendalian pemanfaatan ruang.

B. PENYAJIAN DATA FOKUS

1. Profil Getakan Serentak (GERTAK) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Gerakan Serentak (Gertak) adalah kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu. Program Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Bagi Rumah Tangga Miskin dilaksanakan berdasarkan indikator kemiskinan terutama pada Jenis lantai rumah berupa tanah, bambu atau kayu murahan. Jenis dinding rumah berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester. Sumber Pendanaan kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten.

Program dititikberatkan pada rumah tangga miskin yang dari sisi sarana dasar belum memenuhi standart kualitas kesehatan. Fokus utama program adalah rehabilitasi dan peningkatan sarana dasar perumahan bagi rumah tangga miskin.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran *stakeholder* serta pemerintah desa dilaksanakan untuk mendorong kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan sebagai upaya keberlanjutan program. Hal ini juga akan mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya kepada masyarakat miskin, pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) dan pengurangan kemiskinan.

a. Visi, Misi, Prinsip dan Nilai GERTAK

1) Visi

a) Mengakui dan mengadopsi kemiskinan sebagai masalah multidimensi;

b) Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang bebas dari bias gender;

c) Pengarusutamaan (*main streamming*) penanggulangan kemiskinan dalam seluruh kebijakan dan aksi publik;

d) Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan dan menjamin pengembangan tata kepemerintahan yang baik;

2) Misi

a) Memberdayakan potensi daerah yang berbasis sumberdaya lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan serta ditunjang dengan profesionalisme aparatur

pemerintah dan mobilisasi sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien;

b) Mewujudkan kepemerintahan yang baik;

c) Memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal;

d) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah;

e) Mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris.

f) Meningkatkan kesehatan masyarakat.

3) Prinsip

a) **Partisipasi**, yakni penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk warga miskin itu sendiri;

b) **Transparansi**, yakni penanggulangan kemiskinan menekankan asas keterbukaan bagi semua pihak melalui layanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak, termasuk masyarakat miskin;

c) **Akuntabilitas**, yakni adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat, khususnya masyarakat miskin;

d) **Keterwakilan**, yakni adanya keterwakilan kelompok-kelompok yang berke-pentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;

e) **Keberlanjutan**, yakni penanggulangan kemiskinan harus menjamin adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, termasuk kelestarian lingkungan hidup;

f) **Kemitraan**, yakni adanya kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan;

g) **Keterpaduan**, yakni adanya sinergi dan keterkaitan yang terpadu antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

4) Nilai

a) Kejujuran; dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan GERTAK harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpang dari visi, misi, dan tujuan GERTAK

b) Dapat dipercaya; semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program GERTAK harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang memberikan masyarakat maupun pemerintah unutk menerapkan aturan dengan baik. Dengan demikian, pemilihan pelaku-pelaku dalam pelaksanaan Program Gertak di tingkat masyarakat pun harus menghasilkan figur-figur yang benar-benar dipercaya masyarakat sendiri bukan semata mempertimbangkan status sosial, pengalaman serta jabatan.

c) Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender; dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan GERTAK harus menekankan azas keadilan, kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin, keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedar pemertaan. Dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan GERTAK , tidak membeda-bedakan latar

belakang, asal-usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lain-lainya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk terlibat serta menerima manfaat GERTAK, termasuk dalam proses pengambilan keputusan;

d) Kebersamaan dalam keragaman; dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat, sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, mata pencaharian, budaya, pendidikan dan sebagainya, dan bukan hanya menjadi urusan dari masyarakat miskin atau pelaku GERTAK atau sekelompok elit saja.

e) Ikhlas; dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan GERTAK benar-benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya, dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya.

b. Tujuan

Program Peningkatan Sarana Dasar Perumahan bagi rumah tangga miskin memiliki tujuan jangka panjang dan jangka menengah, yaitu:

a) Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jombang;

b) Tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan sarana perumahan

masyarakat miskin serta menurunkan kategori rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang.

c. Sasaran GERTAK

1) Masyarakat

Sasaran Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah:

1. Tersedianya Rumah tinggal / hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, dan memenuhi unsur kesehatan perumahan;
2. Meningkatnya kemampuan pemerintah desa dalam fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin;
3. Meningkatnya kesejahteraan bagi rumah tangga miskin;
4. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang;
5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana perumahan sesuai prinsip-prinsip kalitas kesehatan dasar.

2) Sasaran Lokasi

1. Rumah tangga miskin yang berada di wilayah Kabupaten Jombang dan terdaftar sebagai penerima bantuan program berdasarkan Surat Keterangan dari Desa.
2. Masuk dalam indikator rumah tidak layak huni
3. Status tanah dan bangunan adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa;
4. Belum pernah menerima bantuan dari sumber dana manapun untuk pemugaran rumah dan Pembangunan Jamban Keluarga.

d. Strategi dan Pendekatan GERTAK

1) Strategi

Mendorong gerakan masyarakat untuk keberdayaan dan kemandirian dalam penanggulanagan kemiskinan melalui:

1. Mendorong tumbuh berkembangnya prakarsa, partisipasi masyarakat serta transparansi;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan organisasi yang berakar di masyarakat, khususnya dalam mengelola akses bagi masyarakat miskin sumber daya kunci yang disediakan oleh Program GERTAK melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), secara transparan dan akuntabel;
3. Menjalin sinergi penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan masyarakat melalui kemitraan antar pelaku pembangunan;

4. Mendorong tumbuhnya kepedulian berbagai pihak sebagi upaya pengendalian sosial (kontrol sosial) terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

2) Prinsip

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan kegiatan berdasarkan Pendataan/identifikasi oleh Konsultan Pendamping dengan Pihak Desa berdasarkan data PPLS 2008 dan Data RTM Desa;

b. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh Desa dengan dibantu dari Pihak yang ditunjuk, beserta masyarakat Desa penerima bantuan;

c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan (***accountable***), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan;

3) Pendekatan

Program Peningkatan Sarana Perumahan bagi rumah tangga miskin merupakan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, dengan pendekatan melalui:

a) **Pemberdayaan Masyarakat**, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;

b) **Keberpihakan kepada yang miskin**, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk dalam kategori rumah tangga miskin;

c) **Otonomi dan desentralisasi**, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan maupun pemanfaatan hasilnya;

d) **Partisipatif**, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari pemerintah desa;

e) **Keswadayaan**, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pembiayaan;

f) **Keterpaduan program pembangunan**, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain

g) **Penguatan Kapasitas Kelembagaan**, dalam rangka mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

e. Komponen Proyek dan Bantuan Teknik

1) Komponen Pengembangan Masyarakat

a. Uraian

Progam menyediakan dukungan bagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten agar mampu bekerja sama lebih efektif dengan organisasi masyarakat dalam penggulangan kemiskinan.

Kegiatan-kegiatan komponen pengembangan masyarakat meliputi serangkaian kegiatan yang diawali dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pemilihan pimpinan kolektif masyarakat yang representatif, hingga penyusunan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan (PJM Pronagkis) dari, oleh dan untuk masyarakat, serta upaya-upaya nyata yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Pada dasarnya, dukungan pembiayaan komponen ini mencakup biaya fasilisator untuk melaksanakan pendampingan masyarakat dan mediasi sosial, biaya training dan sosialisasi, termasuk penyiapan materi-materi periklanan dan kehumasan yang berkaittan dengan pelaksanaan program GERTAK. Secara singkat komponen ini akan mendukung tiga aktivitas utama sebagai berikut:

a) Pengorganisasian masyarakat

Kegiatan pengorganisasian masyarakat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran kritis masyarakat. Proses penyadaran diataranya

dilakukan melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah dan pemetaan swadaya, sebagai upaya mendorong masyarakat membahas bersama persoalan riil kemiskinan yang dihadapinya, bagaimana menyelesaikannya secara efektif dalam bentuk antara lain: komitmen (individu dan kelompok), keahlian, sumberdaya, kelembagaan, organisasi dan lain-lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat diawali dengan pengadaan kader-kader masyarakat yang bersama fasilitator akan mendampingi masyarakat dalam proses pembentukan atau pengukuhan pemilihan badan/lembaga dari representasi masyarakat terpilih, yang selanjutnya biasa disebut dengan Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa (LPMD), dan akan berperan sebagai motor penggerak masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Apabila masyarakat memutuskan untuk membentuk lembaga baru, fasilitator akan menfasilitasi proses pemilihan anggota-anggota lembaga tersebut (LPMD) agar terlaksana secara demokratis, partisipatif, akuntabel dan inklusif. Sebaliknya, apabila masyarakat memilih untuk memanfaatkan lembaga yang ada, maka fasilitator akan menfasilitasi masyarakat untuk memutuskan apakah anggota-anggota lembaga tersebut telah dipilih melalui proses yang demokratis, partisipatif, akuntabel dan inklusif atau apakah struktur lembaga masyarakat tersebut direvisi serta di modifikasi dan lain-lainnya, sebelum masyarakat benar-benar sepakat menetapkan untuk memanfaatkan lembaga yang ada sebagai LPMD. Istilah LPMD (Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa) merujuk baik pada lembaga yang

dibentuk baru ataupun pemanfaatan lembaga yang ada yang telah melalui proses konfirmasi ulang oleh masyarakat setempat.

b) Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan diwujudkan melalui program dan kegiatan yang disusun setiap tahun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berkenaan dengan usaha mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan serta upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) maka diperlukan adanya peningkatan jangkauan penerima manfaat dari program dan kegiatan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan. Manfaat (*benefit*) atau dampak (*impact)* dapat dicapai melalui pelaksanaan program-program.

Keberhasilan pencapaian program-program diukur dengan indikator hasil (*outcome*) dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kegiatan adalah berupa pencapaian keluaran (*output*) tertentu dari sejumlah subkegiatan dengan menggunakan sumber daya (*input*) tertentu, dalam hal ini adalah anggaran. Dengan demikian, kegiatan dan subkegiatan bersifat dinamis setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pencapaian program, sedangkan program dalam rangka mencapai kebijakan relatif tetap dalam jangka menengah. Perubahan program dapat dilakukan dalam kondisi terdapat perubahan mendasar atau sangat penting/strategis untuk dilakukan program yang dihasilkan nantinya penting dan mendesak untuk segera diimplementasikan. Program yang dihasilkan dinilai realistis sehingga dapat

dilaksanakan dengan tetap memegang prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

c) Forum LPMD

Komponen pengembangan masyarakat juga memberikan pendampingan serta pelatihan untuk mendukung LPMD dalam membentuk asosiasi atau forum antar LPMD di tingkat kecamatan/kabupaten, sebagai sarana komunikasi dan kerjasama secara kolektif.

Forum LPMD akan berfungsi sebagai jaringan tukar pengalaman, melaksanakan kegiatan bersama, mengkombinasikan sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menyuarakan aspirasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kegiatan komponen pengembangan masyarakat di atas dilakukan dengan bertumpu pada penerapan konsep pembangunan dari dalam (*development from with in*), melalui penguatan relawan atau kader-kader unggulan masyarakat di lokasi sasaran.

b. Ketentuan Umum

a) Siapa yang dimaksud masyarakat

Masyarakat adalah bagian / komponen Negara yang terdiri dari beberapa orang ataupun klompok orang yang bermukim / bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu baik sewa maupun milik sendiri dan secara administrative diakui oleh system pemerintahan yang ada.

b) Organisasi masyarakat yang harus dibangun warga dalam GERTAK

Gerakan ini ditangani oleh LPMD dan melibatkan peran serta wanita seperti ibu-ibu PKK dan juga warga masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga akan benar-benar nampak budaya yang masih mengakar di masyarakat pedesaan yaitu budaya/sifat-sifat gotong royong dan kebersamaan

c) Peran apa yang harus dilakukan oleh LPMD

LPMD harus lebih bekerja keras dan dapat bekerja sama dengan Kepala Desa agar pelaksanaan program Bapak Bupati Jombang benar-benar tercapai dan tepat pada sasaran yaitu meningkatkan kehidupan warga masyarakat di pedesaan lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Selain itu LPMD bertindak sebagai forum pengambilan keputusan masyarakat miskin yang menyangkut penanggulangan kemiskinan. Serta LPMD mengawasi proses pemanfaatan dana masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPT.

d) Pendamping masyarakat dalam proses pemberdayaan

1) Tim fasilisator yang secara intensif memfasilitasi Kader Masyarakat, LPMD, Secara umum dalam upaya penanggulanagan kemisknan sebagai bagian dari masukan proyek program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2) Kader masyarakat yang dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat dan bekerja sebagai agen pembangunan masyarakat secara sukarela.

2) Komponen Dana Bantuan Langsung Ke Masyarakat (BLM)

a. Uraian

Komponen dana BLM (Bantuan Langsung ke Masyarakat) secara eksplisit diadakan dengan tujuan utama membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumber daya kapital, yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Dana BLM bersifat dana "wakaf" dari pemerintah ke masyarakat kelurahan penerima, yang pengelolaannya dipercayakan ke organisasi masyarakat yang dibentuk secara demokratis, transparan dan tanggungjawab ke masyarakat, yang secara generik disebut LPMD (Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa).

LPMD ini mempunyai tanggung jawab dalam mekanisme penyaluran dana bantuan Program GERTAK rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dimana alokasi dana BLM masing-masing Kelurahan/Desa sasaran akan dikelola melalui LPMD.

b. Ketentuan Umum

a) Alokasi dana BLM

Jumlah alokasi dana BLM untuk masing-masing Kelurahan/Desa sasaran akan di informasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Namun perlu dipahami, maka jumlah dana BLM yang telah dialokasikan untuk masing-masing Kelurahan/Desa sasaran tersebut merupakan jumlah yang sudah dialokasikan untuk dimanfaatkan. Sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelolaan dan kesiapan

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tujuan dan ketentuan GERTAK.

Bantuan dapat ditarik kembali/dialihkan kepada masyarakat miskin lainnya dalam satu wilayah Desa Penerima Bantuan atau masyarakat lainnya di luar wilayah Desa, apabila berdasarkan penilaian tenaga fasilitator dan pemerintah desa, serta ketika sasaran penerima bantuan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam data sasaran hasil pendataan kemiskinan. Demikian pun halnya, apabila Apabila Desa melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dalam hal pengalihan bantuan harus mendapat persetujuan dari Dinas PU Cipta Karya, dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima.

b) Penyaluran dan pencairan dana

Mekanisme penyaluran dana bantuan rehab rumah tidak layak huni kepada RTM adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan dilakukan melalui LPMD yang ada di wilayah setempat. Bantuan diserahkan secara langsung melalui transfer ke rekening LPMD;
2. Besaran bantuan yang diberikan adalah total alokasi dana RTM sasaran yang berada dalam wilayah LPMD yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu/alokasi tidak cukup maka LPMD dapat mengusahakan tambahan dana melalui swadaya masyarakat atau melalui pembiayaan lainnya;
3. Pencairan bantuan diberikan segera setelah SK Bupati tentang Daftar RTM Penerima Bantuan diterbitkan;

4. Pelaksana kegiatan adalah panitia/seksi yang ditunjuk oleh LPMD;
5. LPMD menyalurkan bantuan kepada masing-masing RTM sesuai alokasi yang ditetapkan secara bertahap:
   a. tahap pertama 50% segera setelah bantuan ditransfer ke rekening LPMD;
   b. tahap kedua 50% sisanya setelah panitia/seksi yang ditunjuk oleh LPMD melaksanakan pekerjaan fisik mencapai 30% dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dikimkan ke Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pertamanan Kabupaten Jombang ;
6. Penyaluran bantuan dari LPMD kepada RTM sasaran dibuatkan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan atas persetujuan kepala desa;

c. Siapa yang berhak menggunakan

Pada dasarnya semua warga miskin yang termasuk dalam 14 indikator kemiskinan di kecamatan pada tiap-tiap desa yang bersangkutan berhak menggunakan dana dari Program GERTAK. Dana yang ada dilaksanakan desa untuk pembangunan dengan melibatkan masyarakat.

d. Bantuan Teknis dan Dukungan Pelaksanaan Proyek

Untuk melaksanakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut dan mencapai tujuan yang diharapkan, PMU (Project Manajemen Unit) akan mengontrak seperangkat konsultan dan fasilitator untuk mengelola pelaksanaan proyek, terutama dikarenakan program GERTAK membutuhkan kehadiran dan pendampingan secara intensif di lapangan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Pada dasarnya dukungan pelaksanaan program mencakup pembiayaan seluruh manajemen proyek yang dapat memampukan PMU untuk mempunyai (1) kualitas kinerja atau performens proyek yang lebih baik, (2) dukungan teknis di lapangan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten, serta (3) evaluasi dan monitoring dampak program yang lebih baik.

Dengan demikian, dukungan pelaksanaan program GERTAK mencakup di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Bantuan teknis bagi pelaksanaan dan monitoring, yang akan meliputi
    1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah desa, kecamatan, konsultansi pendamping dari Dinas PU Cipta Karya, dengan tujuan untuk kebenaran prosedur dan pengendalian mutu yang dilakukan terhadap administrasi serta teknis bangunan;
    2. Pelaporan dilakukan oleh LPMD kepada Dinas PU Cipta Karya.

b) Bantuan teknis dan evaluasi

Pengadaan konsultan evaluasi untuk melakukan baseline survey (survey dasar), survey tindak lanjut, studi evaluasi dan studi khusus sesuai kebutuhan.

c) Administrasi proyek untuk mencakup administrasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek.

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proyek, pelaksanaan proyek di lapangan akan dipercayakan kepada team konsultan yang akan bekerja di bawah

manajemen PMU. Konsultan-konsultan tersebut adalah Konsultan Monitoring dan Evaluasi.

Pada tingkat kecamatan terdapat Tim Fasilisator GERTAK, yang terdiri dari Fasilisator senior dan 3 fasilisator. Tim fasilisator bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program GERTAK dan pendampingan masyarakat di 13 desa sasaran serta akan melakukan pendampingan serta pembinaan intensif kepada masyarakat.

Tabel 5
Pelaksanaan Program Gertak

Desa Penerima 2006	Jumlah	Desa Penerima 2007	Jumlah	Desa Penerima 2008	Jumlah
Gajah	3 Unit	Jombok	4 Unit	Gajah	3 Unit
Ngoro	3 Unit	Genukwatu	3 Unit	Ngoro	3 Unit
Kerjorejo	3 Unit	Kauman	3 Unit	Genukwatu	2 Unit
Banyuarang	3 Unit	Badang	3 Unit	Rejoagung	3 Unit
Pulorejo	3 Unit	Kesamben	3 Unit	Sugihwaras	3 Unit
Rejoagung	3 Unit	Pulorejo	4 Unit	Sidowereg	2 Unit
Sugihwaras	3 Unit	Kertorejo	3 Unit	Jombok	2 Unit
Sidowereg	3 Unit			Banyuarang	2 Unit
Jumlah	24 Unit		23 Unit		20 Unit

Desa Penerima 2009	Jumlah	Desa Penerima 2010	Jumlah
Jombok	3 Unit	Ngoro	3 Unit
Genukwatu	3 Unit	Sugihwaras	3 Unit
Ngoro	3 Unit	Banyuarang	3 Unit
Pulorejo	3 Unit		
Kertorejo	3 Unit		
Gajah	3 Unit		
Kesamben	3 Unit		
Jumlah	24 Unit		9 Unit

Catatan: Kegiatan tahun 2006/2008 dana per unit rumah Rp. 2.400.000,00

Kegiatan tahun 2009 dan 2010 dana per unit rumah Rp. 3.000.000,00

2. Perubahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Penerima Program GERTAK pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

a. Perubahan pada Bidang Fisik/Lingkungan

Adanya program GERTAK rehabilitasi rumah tidak layak huni yang masuk pada tahun 2006 terbukti memberi perubahan yang berarti di bidang lingkungan/fisik pada masyarakat kecamatan Ngoro. Ini terlihat masyarakat lebih terpacu untuk memiliki rumah sehat dan layak huni. pembangunan rumah dapat dilakukan secara lebih terjangkau dan mudah sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat mewujudkan rumah dalam lingkungan yang layak huni. Sedikit penuturan dari Bapak Jono yang merupakan warga penerima bantuan program GERTAK Desa Bakalan:

> "Dengan adanya program ini saya sangat senang sekali karena sebelumnya rumah saya gentengnya banyak yang bocor, serta dindingnya yang masih terbuat dari anyaman bambu pun sudah banyak yang berlubang. Bantuan ini dapat merubah kondisi rumah saya yang sebelumnya tidak layak untuk di huni
>
> tapi sekarang saya sangat nyaman ketika berada di dalam rumah. Tidak takut lagi kebocoran saat musim hujan"
> (Wawancara 2 Februari 2012)

Dari segi kesehatan masyarakat, program GERTAK telah menyentuh pada rehabilitasi rumah tidak layak huni yang sejauh ini dari tahun 2006/2010 telah merehab 100 rumah di kecamatan Ngoro mengingat kondisi rumah yang sudah tidak layak huni dikarenakan mayoritas bangunan berdinding dari bambu yang sudah banyak berlubang serta tidak adanya ventilasi dan masih berlaintai tanah. Inilah hasil wawancara dengan Bapak Mantir yang menjabat menjadi RT di Dusun Bakalan:

> "….salah satu rumah tangga miskin di dusun ini mendapat bantuan dari program GERTAK rehabilitasi rumah tidak layak huni, saya lihat terdapat perubahan dari kebiasaan mereka saat ini. Warga yang menerima bantuan tersebut sekarang ini lebih memperhatikan dan merawat rumahnya. Karena mereka sangat senang dengan adanya program ini. Karena tidak lagi mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumahnya. Dan anggota keluarga yang tinggal di rumah itu tidak lagi sering terserang penyakit yang dikarena kondisi rumah yang tidak terawat".
> (Wawancara 2 Februari 2012)

Perubahan pada bidang aspek lingkungan ini yaitu mengacu pada perencanaan pembangunan yang memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dengan indikatornya antara lain: *pertama*, terciptanya perumahan sehat dan layak huni yang memenuhi standar rumah sehat serta menjadikan bangunan di lingkungan

sekitar menjadi rapi. *Kedua*, adanya kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan perawatan perumahan.

b. Perubahan pada Bidang Ekonomi

Dari pengamatan saya di lapangan setelah adanya program GERTAK rehabilitasi rumah tidak layak huni yang masuk pada tahun 2006 terbukti memberi perubahan yang berarti di bidang ekonomi pada masyarakat kecamatan Ngoro. Ini terlihat terhadap cara pandang masyarakat yang diarahkan untuk menganggap cara hidup yang sederhana dan apa adanya sebagai suatu kemalangan yang perlu diubah dan diarahkan ke gaya hidup nyaman dengan hotel sebagai standar kenyamanannya. Berikut hasil wawancara dengan ibu Rohmah selaku Kepala Desa Pulorejo:

> "Masyarakat penerima bantuan program GERTAK akan berfikir bagaimana untuk menjaga rumah yang telah direhabilitasi tersebut agar tetap menjadi rumah yang sederhana tetapi sehat sehingga mereka akan bekerja keras untuk mempertahankannya. Dan masyarakat miskin tersebut mempunyai pandangan untuk lebih hidup sederhana dalam pengelolaan keuangan meskipun pendapatan yang mereka dapat tidak banyak. Maka masyarakat miskin tersebut ketika menggelola keuangannya itu untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak".
> (Wawancara 2 Februari 2012).

Ditambahkan lagi penuturan oleh Bapak Sutris merupakan warga yang pernah ikut berpartisipasi untuk membantu warga penerima bantuan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ngoro:

> "masyarakat miskin merasakan manfaatnya karena beban hidupnya berkurang setelah adanya program tersebut. Karena dengan bantuan itu dana yang sebelumnya yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka yang dirasa tidak memenuhi rumah sehat. Maka pada saat ini setelah ada bantuan program tersebut dana itu dapat digunakan untuk membangun

usaha lainya serta untuk biaya sekolah anak-anaknya. Hal ini merupakan perubahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat".
(Wawancara 2 Februari 2012).

Aspek ekonomi mengacu pada unsur efisiensi pembiayaan, baik kontruksi maupun pemeliharaan sehingga terjangkau oleh masyarakat. Adapun indikatornya meliputi: *pertama,* adanya peningkatan pendapatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berkaitan dengan peningkatan kualitas ekonomi, maka rumah bukan lagi sekedar *home-life,* tetapi tempat produksi dan berusaha. *Kedua,* menurunnya jumlah pengangguran dan makin variatifnya kesempatan kerja yang ada.

c. Perubahan pada Bidang Sosial

Kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Selain itu, telah diupayakan kegiatan pengembangan perumahan yang berbasis pada keswadayaan. Senada dengan pernyataan Bapak Harsono yang merupakan UPT Ngoro :

"Terciptanya organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen dalam rangka menjaga, memelihara sarana dan prasarana yang ada. Serta adanya kontribusi yang nyata sebagai nilai tambah kswadayaan pelaksanaan fisik lingkungan dari setiap peserta program yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan".
(wawancara tanggal 25 Januari 2012)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sukahar selaku koordiantor LPMD:

"perubahan yang terlihat disini yaitu adanya peran masyarakat yang sangat besar dalam proses berjalannya program GERTAK ini, sehingga dengan

> bantuan masyarakat dapat memperlancar pelaksanaan program GERTAK untuk mencapai hasil yang maksimal. Sehingga tingkat kemiskinan berkurang setelah adanya program ini".
> (wawancara tanggal 21 Januari 2012)

Pada perubahan bidang sosial mengacu pada perencanaan permukiman yang memperhatikan pengaruhnya bagi kehidupan penghuninya, dengan indikatornya antara lain: *pertama*, meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, misalnya kesempatan mendapatkan ketrampilan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. *Kedua*, tersedianya fasilitas sosial dan aktivitas soial sehingga tumbuh lingkungan sosial yang baik. *Ketiga*, makin besarnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan tempat tinggal.

3. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Kebijakan Pelaksanaan Program GERTAK pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

a. Dampak pada Bidang Fisik/Lingkungan

Dengan masuknya program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Pemerintah Kabupaten sekitar tahun 2006 yang lalu Kecamatan ini mulai banyak mengalami perkembangan. Program yang bertajuk pemberdayaan masyarakat ini ternyata telah menjadi motor penggerak terhadap perubahan yang ada di Kecamatan Ngoro tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sukahar selaku koordiantor LPMD:

> "Dengan kondisi rumah yang menjadi lebih sehat, rapi dan teratur telah terjadi peningkatan taraf hidup. Keberhasilan lainnya adalah menurunnya angka kesakitan, pencemaran lingkungan lebih terkendali dan lain-lain. Hal ini menyebabkan beban pemerintah untuk mengatasi masalah pencemaran dan kebersihan lebih ringan. Disamping itu, terjadi peningkatan partisipasi

> masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan akses masyarakat miskin dalam segala aspek pembangunan.
> (wawancara tanggal 21 Januari 2012)

Senada dengan pernyataan Bapak Hadi warga Desa Kesamben:

> "Masyarakat penerima bantuan dapat memiliki rumah yang tampilan fisiknya lebih indah dan layak huni".
> (wawancara tanggal 17 Januari 2012)

Serta ditambahkan lagi pernyataan dari Bapak Suparto selaku Kepala Desa Gajah:

> "Memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".
> (wawancara tanggal 17 Januari 2012)

Dalam pelaksanaan program GERTAK di Kecamatan Ngoro utamanya pada bidang fisik/lingkungan bisa dikatakan banyak menghasilkan manfaat bagi masyarakat tersebut, khususnya ini bisa kita lihat banyak terjadi perubahan serta perkembangan khususnya terkait dengan program bidang fisik/lingkungan pada pelaksaaan program GERTAK.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program ini, khususnya untuk bidang fisik/lingkungan telah mebawa dampak positif secara langsung bagi masyarakat Kecamatan Ngoro pada masyarakat miskin pada khususnya. Masyarakat disini merasa diberikan kenyamanan yang lebih oleh pemerintah dengan adanya perubahan infrastruktur kecamatan. Pelaksananaan program GERTAK di Kecamatan Ngoro, khususnya untuk bidang fisik/lingkungan

bisa dikatakan berjalan lancar sesuai dengan acuan yang terdapat dalam Pedoman Umum GERTAK. Walaupun dalam realisasinya juga mengalami beberapa kendala yang bisa teratasi. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta arahan dari fasilisator yang senantiasa sabar dan gigih untuk selalu mendampingi serta memberikan bimbingan bagi LPMD serta pelaksanaan teknis proyek untuk bidang Fisik/Lingkungan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Rofiqul Ikhsan, SP selaku fasilisator Kecamatan dari Konsultan GERTAK untuk wilayah Kabupaten Jombang:

> "Pelaksanaan program GERTAK di Kecamatn Ngoro ini bisa saya katakan sedikit lebih baik dari kecamatan-kecamatan dampingan saya yang lainnya, khususnya untuk bidang Fisik/Lingkungan. Disini antusias masyarakat sangat muncul, sehingga hal tersebut memudahkan dalam proses pelaksanaan program ini".
> (wawancara tanggal 20 Januari 2012)

Ungkapan yang serupa juga muncul dari pernyataan Bapak Sriono salah seorang warga Ds.Bakalan yang menerima bantuan program GERTAK. Berikut ini adalah petikan hasil wawancara dengan Bapak Sriono:

> "Saya cukup merasakan sekali dampaknya setelah adanya pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan ini, sebagai warga yang kurang mampu tentunya saya sangat bersyukur sekali, bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki rumah saya sedangkan untuk mikir makan saja saya masih kesulitan. Mungkin kita semua berharap program inilah yang harus ditingkatkan sehingga kita sebagai orang kecil merasa sangat diperhatikan dan diberikan kesejahteraan secara materi
> (Wawancara tanggal 3 Januari 2012)

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Program GERTAK di Kecamatan Ngoro khususnya untuk bidang Fisik/Lingkungan dapat dikatakan telah berjalan

sesuai dengan standard dan acuan yang ada dalam Pedoman Umum maupun Teknis yang telah sesuai dengan arahan-arahan atau bimbingan dari fasilitator yang bertugas untuk mendampingi proses pelaksanaan Program GERTAK di Kecamatan tersebut.

b. Dampak pada Bidang Ekonomi

Seperti pada bidang yang lain, pelaksanaan program GERTAK khususnya untuk bidang ekonomi memiliki dampak yang bagus bagi perubahan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Ngoro. Program pada bidang Ekonomi ini bisa dikatakan sebagai roh dari sebuah perubahan masyarakat menuju kesejahteraan, dimana program GERTAK tersebut akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Dengan adanya program itu akan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan inisiatif masyarakat. Yang terpenting adalah peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan. Hasil wawancara dengan bapak Sukahar selaku koordinator LPMD:

> "Tujuan dilaksanakannya program ini untuk menyediakan bantuan biaya penunjang rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di Kecamatan Ngoro, serta menurunkan jumlah rumah tidak layak huni sekaligus menurunkan angka kemiskinan".
> (wawancara tanggal 17 Januari 2012)

Kebijakan ini di lakukan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin dimana dengan adanya kebijakan program ini masyarakat terbantu dengan diberikannya bantuan untuk memperbaiki rumah masyarakat miskin yang sebelumnya rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Berikut ini adalah penuturan dari Bapak Samiono selaku camat Ngoro

> "sebenarnya kebijakan pada bidang ekonomi ini cukup mengena sekali terutama pada masyarakat miskin yang menerima bantuan rehab rumah. Dengan bantuan ini masyarakat miskin tersebut merasa sangat di bantu oleh pemerintah karena mereka memiliki rumah yang layak huni setelah adanya bantuan tersebut. Selain itu dengan bantuan program rehab rumah tersebut menjadi stimulant bagi penerima bantuan rehab rumah untuk lebih menjadikan rumah yang sehat serta dana yang sebelumnya mereka anggarkan untuk perbaikan rumah kini bisa dijadikan untuk menciptakan usaha lain untuk menegntaskan kemiskinan secara mandiri. Akan tetapi apa yang kemudian diharapkan memang tak semudah yang dibayangkan, karena tidak semua khususnya masyarakat miskin penerima bantuan rehab rumah tersebut mengupayakan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sehingga sebenarnya hal ini lah yang menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah mengupayakan dengan baik tetapi masyarakatnya sendiri tidak berpartisipatif maka program trsebut tidak mencapai hasil yang optimal".
> (Wawancara tanggal 16 Januari 2012)

Jadi kondisi seperti itulah yang kemudian menjadikan sedikit permasalahan yang ada dilapangan yang trkait dengan kesadaran masyarakat sendiri terhadap program tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan implementasi dari program ini tetap berjalan seperti apa yang sudah direncanakan. Karena para implementator atau pelaku dari program ini ternyata juga tidak mudah terjebak atau larut dalam maslah tersebut, hal ini terbukti perjalanan proses implementasi yang masih bertahan sehingga masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya implementasi program ini.

Berikut ini adalah ungkapan dari Ibu Suntiani salah seorang warga Desa Banyuarang yang mendapatkan program GERTAK tahun 2008 yang merupakan seorang janda tua terkait dengan manfaat yang didapatkan setelah adanya program ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Suntiani yang menyatakan bahwa:

> "Saya benar-benar bersyukur sekali dengan adanya program dari pemerintah ini, karena berkat dari program tersebut saya mendapatkan bantuan dana untuk memperbaiki rumah saya. Karena saya hanya seorang penjahit, jadi tidak mungkin saya bisa melakukan untuk memperbaiki rumah saya ini. Makanya dengan adanya bantuan seperti inilah yang benar-benar kita bisa rasakan manfaatnya. Ya jika melihat seperti sekarang ini bahan-bahan untuk perbaikan rumah pun mahal sekali. Sedangka orang yang menjahitkan baju di saya pun tidak mesti selalu ada, jadi dari mana saya mendapatkan uang untuk memperbaiki rumah saya ini. Oleh karenanya saya benar-benar mendapatkan manfaatnya berkat program seperti ini, karena rumah saya sekarang menjadi jauh lebih nyaman dari sebelumnya"
> (wawancara tanggal 18 Januari 2012).

Ungkapan yang senada juga muncul dari pernyataan Bapak Imam salah seorang warga Sugih Waras yang mendapatkan bantuan Program GERTAK tahun 2006, yang kebetulan setiap harinya bekerja sebagai buruh tani. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Imam yang menyatakan bahwa:

> "Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya program-program seperti ini, karena berkat bantuan perbaikan rumah seperti ini saya dapat memperbaiki rumah dan saya sangat berterima kasih sekali pada warga disini yang sudah membantu dalam pelaksanaan perbaikan rumah saya. Tadinya saya sempat hampir putus asa, karena mencari uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja sangat sulit. Apalagi untuk memperbaiki rumah saya rasa hal itu tidak mungkin bisa saya lakukan, makanya dulu sempat hampir putus asa juga. Akan tetapi dengan adanya bantuan dana perbaikan rumah seperti ini, yang bagi saya tidak memberatkan bagi masyarakat miskin seperti saya ini, saya merasa mendapatkan manfaat dari program ini. Selain itu saya merasa tertolong serta merasa diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya bantuan dana perbaikan rumah tersebut".
> (wawancara tanggal 23 Januari 2012).

Dari wawancara tersebut diatas disimpulkan bahwa dalam proses implementasi dari Program GERTAK khususnya bidang ekonomi ini bisa dikatakan banyak memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat Kecamatan Ngoro khususnya

masyarakat miskin. Hal ini bisa dilihat dari dampak yang kemudian muncul setelaha adanya proses implementasi program tersebut. Misalnya: dari beberapa keluarga yang bisa dikategorikan kurang mampu,"setelah ditemui dan diwawancarai, ternyata mayoritas dari mereka menjawab bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi mereka, an mereka juga merasa tertolong serta merasa diperhatiakan sekali oleh pemerintah dengan adanya program GERTAK ini. Walaupun pada kenyataannya tataran proses implementasi program banyak kendala yang membuat program ini kurang lancar.

Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun kegiatan masyarakat yang berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.

c. Dampak pada Bidang Sosial

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai kondisi pada bidang sosial yang terjadi di Kecamatan Ngoro memang pada bidang ini banyak kita temukan beberapa masalah yang sudah seharusnya menjadi prioritas utama untuk segera ditangani yaitu Pelayanan terhadap kebutuhan perumahan meliputi Pemugaran Rumah Tidak layak huni. pengguna pelayanan perumahan ini adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang belum memiliki rumah/tempat tinggal.

Dalam pelaksanaan teknis guna memperlancar jalannya implementasi program, LPMD akhirnya membuat kebijakan dengan membentuk Tim survey untuk mengkualifikasikan calon penerima bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran pada orang yang benar-benar layak untuk menerima bantuan tersebut. Berikut tanggapan dari Bapak Hari yang merupakan anggota LPMD Ngoro:

> "untuk bidang pemberdayaan sosial ini, memang sangat perlu dibentuk TIM Survei untuk calon penerima bantuan sosial. Sebab apabila tidak demikian, kita kurang yakin implementasi dari bidang ini bisa berjalan dengan baik. Karena bisa jadi, orang-orang yang kebetulan menjadi target kelompok penerima bantuan dari bidang ini tidak tepat atau kurang tepat sasaran. Sehingga yang seharusnya menerima bantuan akhirnya tidak tersentuh sama sekali oleh dampak kebijakan ini. Selain itu, dengan dibentuknya TIM survey ini nantinya mempermudah dalam pelaksanaan program ini"
> (Wawancara tanggal 26 Januari 2012)

Dengan begitu maka perlu dilakukan pendataan kebutuhan sarana & prasarana permukiman dan perumahan yang ditindaklanjuti dengan perencanaan program pembangunan peningkatan kualitas lingkungan serta meningkatkan kerjasama dengan seluruh *stakeholder's* dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam penyusunan Perda yang berhubungan dengan pelayanan bidang Permukiman, Perumahan, Bangunan Gedung dan Tata ruang dalam upaya peningkatan masyarakat yang sadar hukum dan partisipatif dalam program pembangunan sesuai dengan target. Selain itu pula perlu untuk meningkatkan kemampuan SDM dengan pelatihan tenaga teknis dan menambah jumlah personil yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan serta peningkatan sarana dan prasana pendukung dalam upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan penataan ruang di seluruh kawasan dan pelaksanaan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat. Serta Terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan yang berkelanjutan. Diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan prilaku individu ke arah yang lebih baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, Msi selaku Kepada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jombang:

> "Kegiatan ini mampu mengurangi beban masyarakat, dan semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga pada saatnya nanti di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sudah tidak ada lagi warga yang tinggal dirumah tidak layak".
> (Wawancara tanggal 18 Januari 2012)

Sementara itu, menurut Ir. Arif Gunawan, AIP.SP1 yang menangani di bidang pemukiman mengatakan:

> "Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial".
> (Wawancara tanggal 18 Januari 2012)

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui beberapa masalah sosial dan penyikapanya yang sudah direalisasikan di lapangan. Memang kebijakan yang telah diambil untuk bidang ini sudah menampakkan dampaknya bagi orang-orang yang dikategorikan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Dampak dari upaya penanggulangan kemiskinan di bidang sosial tersebut, khususnya untuk menyadarkan masyarakat agar untuk bisa berpartisipatif dalam

mendukung pelaksanaan program ini. Karena dalam program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu warga miskin untuk mendapatkan program brehabilitasi rumah tidak layak huni dalam proses pembangunan. Serta Penyelenggaraan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada rumah tangga miskin sesuai standart minimal kesehatan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan yang mandiri oleh rumah tangga miskin penerima bantuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara sosial, nyaman secara hunian dan kesehatan keluarga.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ini ditujukan untuk dapat melukiskan atau menggambarkan fenomena dampak pelaksanaan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sehingga akan didapatkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan program berikutnya. Berikut secara berturut-turut disajikan analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud:

1. Analisis Terhadap Profil Program GERTAK Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Kecamatan Ngoro apabila kita lihat secara geografis dan demografis bisa dikatakan merupakan kecamatan yang banyak memiliki potensi. Kecamatan ini juga tergolong Kecamatan yang luas akan lahan pertanian. Apabila dilihat dari aspek perekonomian, sektor pertanian di Kecamatan ini dikatakan sangat dominan. Akan

tetapi sistem pengelolaannya masih tergolong tradisional, sehingga produk pertanian untuk lahan sawah masih cenderung monoton pada tanaman unggulan padi.

Hal inilah yang sebenarnya memerlukan sebuah sentuhan pikiran dan tenaga agar aspek perekonomian khususnya untuk sektor pertanian dapat ditingkatkan. Menurut McArdle (1989) yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, nahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan serta ketrampilan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka (Hikmat, 2010:3).

Melihat dari kenyataan yang ada, dapat dikatakan Kecamatan Ngoro secara ekonomi perlu adanya sebuah pemberdayaan yang nantinya mampu menjadi pendorong untuk melakukan proses perubahan tang memungkinkan masyarakat khususnya para petani untuk bisa lebih maju dalam sektor pertaniannya.

Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sosial. Dalam proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Melihat kondisi masyarakat Kecamatan Ngoro yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakatnya, serta kondisi kesejahteraan masyarakatnya, maka aspek tersebut perlu adanya sebuah pemberdayaan yang nantinya mampu memberikan sebuah perubahan yang mendasar bagi masyarakat.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996). Tujuan pemberdayaan yaitu untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2010:7). Berangkat dari teori-teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yeng telah termuat dalam Program GERTAK di Kecamatan Ngoro, bisa dikatakan sudah cukup menyentuh berbagai aspek yang ada.

Dari uraian tersebut, kita bisa memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat di Kecamatan Ngoro serta kondisi lingkungannya dipandang perlu adanya sebuah pemberdayaan masyarakat. Pmberdayaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun mental masyarakat secara sadar akan kondisi realitas hari ini. Kesadaran akan perannya sebagai motor penggerak dalam kapasitasnya, diharapkan akan mampu melandasi aktifitas penanggulangan kemiskinan oleh mereka sendiri. Sehingga dalam hal ini, diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang ada gilirannya akan dapat tercipta sebuah lingkungan dengan perumahan yang layak huni di dalam permukiman yang lebih mandiri dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

2. Analisis terhadap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat penerima program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Kebijakan menurut Carl Friedrich (1969) yang mengatakan bahwa "Serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan

kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mencapai tujuan (Agustino, 2006:7)".

Keberadaan program GERTAK di Kecamatan Ngoro merupakan sebuah produk kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat guna menumbuh kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Melalui program GERTAK diharapkan ada suatu proses pemberdayaan dan sebuah perubahan yang mendasar pada masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan yang kemudian menjadi target dari program dapat tercapai.

Sementara itu, yang disampaikan oleh Schumacker bahwa pemberdayaan menyangkut sebuah kekuatan dalam masyarakat adalah jumlah, maka bisa disebut kekuatan masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (Sudarwati, 2009:80).

> Kemudian menurut Friedmann ada beberapa strategi yang dapat dipergunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi: *pertama*, strategi fasilitasi, dimana dipergunakan ketika masyarakat yang dijadikan target mengetahui ada masalah dan membutuhkan pengubahan, ada keterbukaan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat. *Kedua*, strategi persuasif, berupaya membawa setiap perubahan melalui kebiasaan, dimana pesan distruktur dan dipresentasikan. Jadi persuasi mengacu pada tingkatan reduksi dimana agen perubah mempergunakan emosi dan hal-hal yang tidak rasional untuk melakukan perubahan. *Ketiga*, strategi re-edukasi, diistilahkan dengan reeduksi karena biasanya selalu melibatkan proses justifikasi rasional atas aksi yng dilakukan. Strategi ini membutuhkan waktu khususnya dalam membentuk pengetahuan dan keahlian. Re-edukasi dipergunakan untuk member pemahaman dan penegtahuan baru dalam mengadopsi suatu ubahan.

> Segmentasi menjadi factor penting untuk membuat pesan agar mudah dimenegrti dan diterima oleh kelompok yang berbeda. Karakteristik demografi merupakan pengkategorian yang umum dipergunakan dalam segmentasi. Segmentasi ini dalam aplikasinya berupa pelatihan, misalnya: pelatiha dalam memanajemen kelompok dan teknis pemeliharaan saran / prasarana. *Keempat*, strategi kekuasaan, sangat efektif karena fasilitator memiliki sumber-sumber untuk memberikan bonus atau sanksi pada target serta memiliki kemampuan untuk memonopoli akses. Pada tataran teknis fasilitator bertindak sebagai konsultan lapangan dapat merekomendasikan/ tidak merekomendasikan nataupun meminta pertanggungjawaban hasil (Soesilowati, 2009:70).

Berangkat dari pandangan teori-teori para pakar tersebut, kita bisa melihat lebih jauh mengenai perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya pada masyarakat penerima program GERTAK di Kecamatan Ngoro. Dari situ, guna untuk memudahkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, maka kita bisa membagi kedalam tiga bidang yang menjadi fokus dari program GERTAK sendiri.

a. Perubahan pada bidang Fisik/Lingkungan

Dilihat dari lingkungan fisik Kecamatan, wilayah Ngoro pada awalnya bisa dikatakan masih tergolong minim dengan infrastruktur yang layak untuk dipergunakan. Karena banyak rumah warga yang tergolong tidak layak huni. Dengan adanya GERTAK khususnya di bidang Fisik/Lingkungan, sedikit demi sedikit Kecamatan ini mengalami perubahan. Dengan memberikan bantuan terhadap pemukiman bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kondisi perumahan masayakat msikin yang dulunya dikatakan jauh dari standar rumah sehat dan layak huni kini setelah adanya bantuan dana program GERTAK rumah masyarakat penerima bantuan mempunyai kondisi rumah yang

memenuhi standar kelayakan rumah yang sehat dan nyaman. Masyarakat mulai merasakan manfaatnya dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut. Mereka merasa sangat diperhatikan oleh Pemerintah sehingga, pada akhirnya mereka sangat antusias sekali dengan keberadaan program GERTAK ini.

Selain itu masyarakat untuk lebih bisa memanfaatkan bantuan dari program ini dengan merawat dan memanfaatkan bantuan dari program GERTAK dengan sebaik-baiknya, karena dengan hal itu kemiskinan masyarakat bisa sedikit dikurangi.

b. Perubahan pada bidang ekonomi

Dilihat dari bidang ekonomi, di Kecamatan Ngoro masih banyak ditemukan masyarakat yang tergolong miskin. Sesuai dengan karakteristik yang sudah ada dipaparkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa warga masyarakat Kecamatan Ngoro masih banyak keluarga yang tergolong miskin.

Sebelum ada program ini masyarakat yang masih memiliki rumah yang tidak layak huni banyak terserang penyakit karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk di huni. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah bila untuk dipergunakan untuk melakukan perbaikan rumah,untuk makan saja masih kesulitan.

Sesudah ada program ini, sedikit demi sedikit kondisi perekonomian mulai mengalami perubahan. Dengan adanya bantuan dana untuk merehabilitasi rumah warga miskin maka warga sangat merasa dibantu karena dengan bantuan tersebut dapat mengurangi beban mereka dalam mengeluarkan dana untuk perbaikan rumahnya. Sehingga masyarakat dapat menyisihkan uangnya untuk dijadikan untuk

mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan tidak akan khawatir lagi dengan keadaan rumah yang atapnya bocor sehingga sering terjangkit penyakit karena kondisi rumah yang tidak layak huni tersebut.

c. Perubahan di bidang sosial

Dilihat dari bidang sosial, seperti apa yang sudah dipaparkan pada data sebelumnya, di Kecamatan ini masih ditemukan beberapa masalah terkait dengan bidang sosial. Di kecamatan ini masih terdapat beberapa keluarga miskin yang masih menempati rumah yang tidak layak huni. Dimana hal ini disebabkan karena pendataan yang belum lengkap. Untuk lebih lanjut diharapkan adanya pendataan yang lengakap agar bantuan program ini dapat menyentuh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk dapat menerima bantuan program rehab rumah tidak layak huni ini.

Selain itu, di Kecamatan ini juga kita temukan beberapa masalah dari perilaku warga sendiri yang belum mempunyai kesadaran untuk bisa membantu dalam pelaksanaan program GERTAK ini. Karena dalam program ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Dan diharapkan apabila ada kekurangan dapat dibiayai oleh masyarakat sendiri dalam bentuk swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi pelaksanaan program, sehingga diharapkan pencapaian tujuan program lebih optimal.

3. Analisis dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan program GERTAK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Kebijakan atau *policy* diartikan Laswell dan Kaplan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Islamy, 2009: 4), GERTAK merupakan program pencapaian tujuan. Demikian juga adanya GERTAK ini dikarenakan ingin memberdayakan potensi daerah yang berbasis sumberdaya lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan serta ditunjang dengan profesionalisme aparatur pemerintah dan mobilisasi sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien serta Memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal (sesuai dengan misi GERTAK dalam Pedoman Umum Gertak, 2010)

Sebagaimana yang telah diketahui, pelaksanaan GERTAK di Kecamatan Ngoro tidak terlepas dari peranan LPMD. LPMD sebagai organisasi masyarakat pada dasarnya merupakan wadah perjuangan warga masyarakat kecamatan untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perangkat pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakn publik di tingkat lokal diharapkan dpat menempatkan perannya sebai fasilitator untuk mendukung prakarsa masyarakat.

Disini, apabila kita mencoba sedikit mengevaluasi kinerja LPMD ada beberapa kinerja yang cukup memenuhi standar. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat, masyarakat cukup berperan aktif dalam dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Dengan adanya LPMD disini aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Disini LPMD harus lebih bekerja keras dan dapat bekerja sama dengan Kepala Desa agar pelaksanaan program Bapak Bupati Jombang benar-benar tercapai dan tepat pada sasaran yaitu meningkatkan kehidupan warga masyarakat di pedesaan lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Selain itu LPMD bertindak sebagai forum pengambilan keputusan masyarakat miskin agar hal yang menyangkut penanggulangan kemiskinan. Serta LPMD mengawasi proses pemanfaatan dana masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPT.

Pada dasarnya implementasi GERTAK di Kecamatan Ngoro bukan mutlak sepenuhnya menjadi tanggunga jawab LPMD, sehingga dalam kaitannya ini kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kurang maksimalnya implementasi GERTAK di Kecamatan ini karena kesalahan LPMD. Memang dalam implementasi GERTAK ini haruslah di bentuk LPMD sebagai pelaku utama dalam pelkasanaan kebijakannya, akan tetapi dalam sebuah kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tersebut tercapai dan pada akhirnya akan membuahkan manfaaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jones yang mencoba merumuskan evaluasi kebijakan dengan dihubungkan dengan penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Jones merumuskan evaluasi kebijakan" sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda secara tajam tentang spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya" (Islamy,

2009: 15). Apabila indikator ini yang kita pakai maka bisa dikatakan bahwa proses implementasi GERTAK di Kecamatan Ngoro secara teknis masih kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari indiator kinerja dari beberapa element pelaku GERTAK yang memang kurang bisa berjalan maksimal dengan beberapa kendala yang sudah kita uraikan sebelumnya.

Akan tetapi apabila kita mengacu pada teori yang berbeda yang dikemukakan oleh Lester dan dan Stewart (2000) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mengasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2006:185).

Sejalan dengan pendapat diatas evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum (Agustino, 2006:187).

Sehingga dari teori yang telah dikemukakan kedua ahli tersebut bisa dikatakan bahwa proses implementasi GERTAK di Kecamatan Ngoro sudah cukup layak. Hal ini bisa kita lihat dari dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin yang merasa senang dengan adanya program GERTAK ini. Selain itu beberapa kebutuhan masyarakat diantaranya sudah dapat trakomodasi melalui LPMD dalam PJM Pronangkisnya, sehingga masyarakat khususnya

masyarakat miskin dapat diberdayakan secara optimal dalam mndukung program-program yang telah dilaksanakan.

Di dalam praktek sering kali terjadi rencana kebijakan yang telah tersusun dan terperinci dengan rapi tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik pula. Dalam implementasinya, suatu rencana kebijakan bisa saja mengalami perubahan atau penyesuaian. Begitu pula dengan kebijakan GERTAK yang sudah terlaksana di Kecamatan Ngoro.

Namun kita bisa melihat dampak dari adanya pelaksanaan kebijakan tersebut dengan membandingkan antara hasil (outcome) dari suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan (*goals*) atau rencana yang telah di tetapkan di awal. Dari situ, sesuai dengan data yang sudah kita uraikan di atas maka bisa kita katakan bahwa pelaksanaan GERTAK di Kecamatan Ngoro telak layak dan telah memenuhi tujuan, hal ini bisa kita lihat melalui perubahan-perubahan yang telah terjadi diantaranya:

a. Dampak pada bidang fisik/lingkungan
    1) Terciptanya masyarakat untuk lebih terpacu untuk memiliki rumah sehat dan layak huni.
    2) Masyarakat lebih merasa nyaman dan aman untuk menampati rumah yang sehat dan layak huni.
b. Dampak pada aspek ekonomi
    1) Terciptanya kesejahteraan masyarakat.
    2) Terciptanya masyarakat produktif

c. Dampak pada aspek sosial

1) Tumbuhnya solidaritas dan partisipasi antara sesama yang akan menjadi kekuatan dan pendorong pembangunan perumahan.
2) Terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan yang berkelanjutan. Diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan prilaku individu ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GERTAK di Kecamatan Ngoro telah berdampak positif terhadap masyarakat setempat khususnya masyarakat miskin. Karena program GERTAK di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang merupakan progam penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Program penanggulangan kemiskinan dengan model pemberdayaan merupakan program yang dapat menjadikan masyarakat miskin mempunyai wawasan karena dengan model pemberdayaan seperti ini masyarakat miskin turut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan serta masyarakat miskin tersebut bisa mendapatkan informasi mengenai pembangunan. Dengan begitu perubahan perilaku masyarakat miskin tersebut bisa membantu mereka untuk mengurangi kemiskinan. Karena dengan adanya program GERTAK ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berupa rumah yang layak huni. Setelah terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut hal itu bisa menjadikan masyarakat untuk bisa menanggulangi kemiskinannya sendiri dengan menggunakan penghasilan mereka untuk memenuhi

kebutuhan yang lainnya sehingga bisa membantu mereka untuk terbebas dari kemiskinan.